

PENTINGNYA PEMERHATIAN SARANA DAN PRASARANA BAGI PENDIDIKAN DISEKOLAH YANG TERPENCIL

Sri Rezeki Jelita Rajagukguk, Sentikhe Tumanggor, Jenifer Grace Malau, Helena Turnip, M.Pd

srirezekijelitarajagukguk@gmail.com, <mailto:sentikhetumanggor@gmail.com>,

[Jenefergrace3@gmail.com](mailto:jenefergrace3@gmail.com), helenaturnip02@gmail.com

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Abstract

Facilities and infrastructure are factors that are very supportive for the ongoing learning process in schools. Facilities are all equipment and equipment that are directly used, while infrastructure is the opposite of educational facilities, namely all facilities that indirectly support the running of the education or teaching process when these are used directly in the learning process, these components are referred to as educational facilities. At this time in Indonesia educational facilities and infrastructure are not evenly distributed, especially in remote schools or areas that are not reached by very little attention to the development or improvement of school education facilities and infrastructure. This has a very bad influence as well as an obstacle to increasing students' knowledge and teaching and learning activities.

Keywords: *Facilities and Infrastructure, Education, School.*

Abstrak

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat mendukung bagi berlangsungnya suatu proses pembelajaran disekolah. Sarana merupakan seluruh peralatan dan juga perlengkapan baik secara langsung dipergunakan, sedangkan prasarana adalah kebalikan dari sarana pendidikan yakni seluruh fasilitas yang secara tidak langsung mendukung berjalannya proses pendidikan atau pengajaran ketika hal tersebut dimanfaatkan secara langsung dalam proses pembelajaran maka komponen tersebut disebut sebagaimana sarana pendidikan. Pada saat ini di Indonesia Sarana dan Prasarana Pendidikan tidaklah merata, terutama di sekolah-sekolah terpencil ataupun daerah yang tidak terjangkau akan sangat minim perhatian dalam pengembangan ataupun peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan sekolah. Hal ini sangat berpengaruh buruk juga penghambat pada peningkatan pengetahuan peserta didik maupun kegiatan belajar mengajar.

Kata Kunci: *Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Sekolah.*

PENDAHULUAN

Sarana dan Prasarana Pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah, maka perlu ditingkatkan pemanfaatan dan pengelolaannya guna mencapai tujuan yang telah diantisipasi. Sesuai dengan ketentuan UU No. 20/2003, Pasal 45 Ayat 1, memberikan penjelasan sebagai berikut: Sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, dan sosial, emosional, dan psikologis peserta didik, sarana dan prasarana disediakan oleh setiap satuan pendidikan formal dan nonformal. Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana satuan pendidikan karena pendidikan tidak akan berfungsi secara efektif tanpa dukungannya.

Alat yang dapat menunjang dan memperlancar program pendidikan yang direncanakan antara lain sarana dan prasarana. Ruang belajar adalah semua perangkat keras dan peralatan yang langsung digunakan untuk membantu siklus belajar, seperti struktur, ruang belajar, ruang kerja, serta perangkat dan media pembelajaran. Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah semua fasilitas yang secara tidak langsung menunjang terselenggaranya proses pendidikan atau pengajaran, seperti lokasi sekolah, taman, kebun sekolah, dan jalan menuju sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana pendidikan” adalah komponen-komponen yang dimanfaatkan secara langsung dalam proses pembelajaran.¹

Selain tenaga pengajar, sarana dan prasarana merupakan penunjang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, pendidikan tidak akan berjalan efektif. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan akan memberdayakan peserta didik untuk belajar, namun sarana dan prasarana tidak dapat dipenuhi tanpa pengelolaan di lembaga pendidikan terkait.

Kondisi pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama dalam hal infrastruktur. Seperti yang terjadi di sekolah-sekolah di seluruh negeri, papan tulis mulai rusak akibat seringnya rembesan air dari atap yang bocor, hanya ada sedikit meja dan kursi di ruang kelas, sekolah miskin hanya memiliki sedikit buku, dan sekolah tidak memiliki alat belajar. atau media. Karena kondisi fasilitas belajar yang demikian memprihatinkan, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak kondusif. Seseorang akan mendapatkan pendidikan jika sesuai dan baik, dan sudah pasti sekolah harus fokus pada manajemen, sarana dan prasarana, dan sistem pembelajaran di kedua sisi.²

¹ Barnawi, & Arifin, M. (2012). Manajemen sarana dan prasarana sekolah, (171011500095).

² Trisnawati, Zahri Harun, C., & Usman, N. (2017). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sd Negeri Lamteubee Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 7(1), 62–69.

Minimnya sarana dan prasarana semacam kebutuhan minimum merupakan persoalan utama dalam pendidikan sekolah di Indonesia, khususnya di daerah terpencil yang jauh dari kota. Padahal, daerah terpencil tidak saling melengkapi dalam hal pembangunan, termasuk sumber daya manusianya sendiri untuk memungkinkan pembangunan pendidikan. Literasi dan akar pembelajaran, serta alat pengajaran pendidikan dan media pendidikan, semuanya merupakan komponen penting dari pendidikan yang efektif. Infrastruktur akan berfungsi dengan baik jika peralatan fasilitas tersebut di atas memadai dan dikelola dengan baik.³

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah dari berbagai jurnal, terkait pentingnya pemerhatian sarana dan prasarana pendidikan sekolah terpencil. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab tidak memadainya sarana dan prasarana disekolah terpencil. Metode penelitian ini berguna untuk mengetahui persoalan yang terjadi pada sekolah terpencil. Maka dari itu, informasi ditemukan dari kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang membantu keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran. Salah satu sumber daya yang dijadikan tolok ukur mutu suatu sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan yang perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Salah satu komponen masukan adalah infrastruktur, dan salah satu subsistem adalah masukan. Kemampuan siswa harus ditunjang dengan infrastruktur agar mampu bersaing dengan pesatnya laju teknologi. Untuk menjamin kegiatan belajar mengajar selalu berjalan lancar, sarana dan prasarana perlu dipersiapkan secara cermat dan berkesinambungan. Untuk menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang efisien dan efektif, pendidikan membutuhkan sarana dan prasarana.

Persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada warga negara sehingga pendidikan menjadi wahana pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan dikenal dengan masalah pemerataan pendidikan. Ketika masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat tertampung dalam sistem pendidikan atau lembaga pendidikan karena keterbatasan fasilitas, muncul persoalan pemerataan pendidikan.

³ Sabrina, E., Michael, T., & Rozarie, P. R. A. De. (1945). *Educational Rights in Supporting Student Creativity*.

Sistem pendidikan di Indonesia masih sangat buruk kualitasnya. Standar mutu pelayanan minimal belum terpenuhi oleh 88,8% sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK. Guru, gedung sekolah, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, buku teks dan pengayaan, serta buku referensi masih sedikit dan jarang di pendidikan dasar. Hanya 3,29 persen dari 146.904 Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi standar nasional, 51,71 persen memenuhi standar minimum, dan 44,84 persen di bawah standar pendidikan minimum. 28,41% dari 34.185 SMP sudah memenuhi standar minimal, sedangkan 26% belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Informasi dari Bagian Kerja Inovasi Pengabdian Umum (2003) menyebutkan bahwa terdapat 146.052 sekolah dasar yang menampung 25.918.898 siswa dan memiliki 865.258 wali kelas. Ruang kelas dalam kondisi baik sebanyak 364.440 atau 42,12%, rusak ringan sebanyak 299.581 atau 34,62 persen, dan rusak berat sebanyak 201.237 atau 23,26 persen.

Biasanya, kekurangan sarana dan prasarana bermula dari gedung sekolah yang hanya memiliki dua atau tiga kelas, tidak ada ruangan lain seperti perpustakaan, sarana olah raga, laboratorium, atau sarana belajar seperti buku pelajaran mutakhir dan sarana lainnya, dan hanya sebuah jumlah guru yang sangat sedikit.

Skenario ini juga ada di daerah perkotaan, di mana sekolah, misalnya, melakukan pengajaran di bawah jembatan dan bangunan lainnya. Prasarana dan sarana sekolah di Indonesia dirundung banyak masalah akibat kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Setiap kelas memiliki infokus, sekolah memiliki jaringan internet atau nirkabel, dan sebagainya.⁴

b) Perkembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah

Di tengah perubahan global, penyelenggaraan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan agar warga negara Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional dan internasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8, Pemerintah telah memerintahkan pembentukan delapan standar nasional pendidikan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Persyaratan minimum untuk sistem pendidikan di setiap yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai standar nasional pendidikan.⁵

Pendidikan di Indonesia sangat kurang, terutama dalam hal sarana dan prasarana, seperti halnya sekolah yang rusak infrastruktur pendidikan, yang menjadi sumber perhatian utama, terutama di daerah terpencil. Dalam hal ini, fasilitas kegiatan belajar mengajar sama sekali tidak layak untuk belajar, seperti gedung kelas yang bocor dan bangku sekolah yang tidak memadai atau rusak.

⁴Putra, B. M. J. (2020). *Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan pengelolaannya*. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/dp34h>

⁵ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. nomor 24 tahun 2007. (2007). Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.

Jika kantor dan sistem sekolah kurang, maka akan menyebabkan kurangnya pendidikan, yang disebabkan oleh kantor sekolah yang terbatas dan kurangnya pembelajaran. Terdapat kelemahan manajemen dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta didik untuk belajar.

Akibat papan tulis yang mulai rontok akibat seringnya rembesan air dari atap yang bocor dan kurangnya meja dan kursi di ruang kelas, kondisi pendidikan di Indonesia sangat genting, terutama dalam hal infrastruktur. Karena kondisi fasilitas belajar yang demikian memprihatinkan, kegiatan belajar mengajar menjadi tidak kondusif. Seseorang akan mendapatkan pengajaran dengan asumsi cocok, bagus dan yang pasti sekolah harus fokus pada banyak hal di setiap sisi, baik administrasi, kantor dan kerangka kerja, dan kerangka pembelajaran.⁶

Minimnya sarana dan prasarana semacam kebutuhan minimum merupakan persoalan utama dalam pendidikan sekolah di Indonesia, khususnya di daerah terpencil yang jauh dari kota. Padahal, daerah terpencil tidak saling melengkapi dalam hal pembangunan, termasuk sumber daya manusianya sendiri untuk memungkinkan pembangunan pendidikan. Literasi dan akar pembelajaran, serta perangkat pengajaran pendidikan, media pendidikan, dan fasilitas lain yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang tertib dan efektif harus ada di setiap lembaga pendidikan. Infrastruktur akan berfungsi dengan baik jika peralatan fasilitas tersebut di atas memadai dan dikelola dengan baik.

Hal ini dimungkinkan karena kemiskinan merupakan faktor diskriminasi yang menyebabkan ketimpangan pendidikan dan salah satu faktor penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia. padahal suatu tujuan pendidikan dapat didukung dengan adanya sarana dan prasarana (Huda, 2018).

Jika terjadi kekurangan biaya pendidikan, dari sekolah swasta sampai sekolah negeri, maka pemerintah harus mengembangkan nilai kalkulasi keuangan untuk pendidikan dan kemudian memasukkan pembiayaan pendidikan untuk masyarakat. Negara berkewajiban untuk menyaring kantor dan yayasan di setiap distrik, apakah hilang atau rusak berat. Memberikan beasiswa dengan bimbingan yang cermat, memotivasi atau mendorong setiap staf pengajar yang bertugas mengajar di daerah terpencil, mengintegrasikan aturan pendidikan terpadu bagi siswa yang membutuhkan pendidikan khusus, dan meningkatkan partisipasi warga dengan dukungan penyelenggaraan pendidikan siswa yang baik adalah beberapa di antaranya. tentang cara-cara yang harus dijembatani oleh negara tersebut dan memberikan kesempatan untuk membantu warga negaranya yang mungkin tidak dapat mengenyam pendidikan.

⁶ Trisnawati, Zahri Harun, C., & Usman, N. (2017). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sd Negeri Lamteubee Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 7(1), 62–69.

Sekolah yang mahir mengolah dana dan juga harus meminta dana dari pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah merupakan contoh upaya yang dapat dilakukan. Jika ada kendala, guru juga bisa lebih kreatif dan menggunakan alat bantu seadanya untuk mengajar. Dengan segera membayar uang sekolah dan iuran komite, orang tua dapat berkontribusi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Untuk menentukan sarana dan prasarana mana yang kurang dan perlu ditambah atau diperbaiki, lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah terdekat.

Saat ini, tanggung jawab utama pemerintah adalah mengefektifkan pendidikan di perkotaan dan mengabaikan pendidikan di pedesaan. Ujung-ujungnya, muncul persoalan di daerah terpencil dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan, seperti guru yang mendominasi di kota tetapi kekuatannya kecil di daerah terpencil. Untuk melengkapi pemerataan sarana dan prasarana di sekolah, upaya tersebut perlu dilakukan secara benar dan maju.

Pendirian instruktif adalah landasan yang esensial bagi tatanan sosial negara yang bertujuan untuk menjadikan manusia manusia yang cerdas, serba bisa, lihai, memiliki ciri fisik dan keduniawian yang hebat, serta memiliki pendidikan yang berbakat, serta akhlak yang mantap. Melalui revolusi pendidikan pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan metode pengajaran yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana tersebut akan menjadi landasan bagi seluruh kegiatan pembelajaran di masa mendatang, khususnya komunikasi antara guru dan siswa selama proses belajar mengajar. Sebagai seorang guru, Anda memiliki tanggung jawab untuk merencanakan cara yang efektif dan bermakna bagi siswa untuk belajar sehingga hasil yang Anda peroleh dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda.

Belajar datang dalam berbagai bentuk dan memiliki banyak karakteristik yang berbeda. Akibatnya, fasilitas belajar mengajar yang berbeda diperlukan untuk setiap sumber daya instruksional. Guru mutlak membutuhkan media yang dapat menunjang kinerjanya selama proses pembelajaran. Hanya dengan demikian kegiatan belajar mengajar dapat menarik dan menyenangkan siswa. Meskipun ada fasilitas penunjang pembelajaran, namun guru terkadang memberikan informasi secara tertulis dan contoh, tergantung sarana prasarana guru.

Ada keterkaitan langsung antara urgensi fasilitas kegiatan belajar mengajar, siswa, tenaga pendidik, dan sekolah. Mahasiswa sangat mendukung fasilitas tersebut. Karena tidak semua siswa akurat, penggunaan fasilitas belajar membantu siswa, terutama mereka yang berjuang untuk mengikuti kegiatan belajar dan belajar. Fasilitas infrastruktur yang mendukung guru akan sangat membantu. Kegiatan belajar juga dapat digambarkan sebagai sangat beragam, menawan, dan tenang. Padahal sekolah perlu menjadi komponen yang mengemban amanah untuk mengelola semua kegiatan sekolah secara maksimal, namun sekolah harus merawat dan memelihara fasilitas yang ada (Rahmiga, 2014).

Dalam UU No. 1 disebutkan kewajiban untuk memperoleh hak atas pendidikan. 20-2003, yang pada dasarnya mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas pendidikan. Artinya, meskipun suatu negara memiliki orang yang cacat fisik, emosional, atau mental, orang tersebut juga harus mendapatkan pendidikan, tetapi pendidikan khusus, meskipun mereka hanya

warga negara. Pendidikan juga harus tersedia bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Berkenaan dengan pelatihan, ada peregangan antara kemajuan dan nilai, dimana otoritas publik berkewajiban untuk memastikan kedua hal tersebut. Akibatnya, pemerintah mencari cara untuk memenuhi salah satu tanggung jawabnya, yaitu memberikan dukungan keuangan untuk peningkatan pendidikan. Untuk menjamin pelatihan yang berkualitas, pendekatan terbaik adalah mengembangkan lebih lanjut pengalaman pendidikan, yang menggabungkan kelas-kelas di mana biaya tinggi juga harus diarahkan. Pendanaan untuk pendidikan harus dihitung secara akurat dengan menggunakan biaya satuan dan komponen kegiatan. Ini harus dimasukkan dalam analisis pemanfaatan biaya jika hal ini dilakukan. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi pendidikan warga negara tertuang dalam konstitusi. Akibatnya, secara umum disepakati bahwa dana untuk biaya pendidikan yang signifikan berasal dari APBN dan disebut sebagai BOS (Fauzan, 2014). Hasilnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan pada tahun 2005. Menurut Oktaviasari et al., tujuan BOS berlaku untuk semua sekolah swasta dan negeri yang termasuk dalam sistem dana pendidikan dasar. 2018). Dimulai dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan pendidikan, dan pemantauan anggaran pendidikan, anggaran diluncurkan. Untuk memastikan bahwa BOS dilaksanakan sesuai dengan peraturan, tim pusat provinsi dan kabupaten/kota mengelolanya.

Tujuan menjadi efisien dan efektif hanya dapat dicapai melalui pengelolaan dana BOS yang efektif, oleh karena itu sangat penting. Menurut Fitri (2014), sekolah yang berhasil mengelola program BOS melakukannya melalui proses kolaboratif yang diawali dengan perencanaan pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi yang sistematis.

c) Perbedaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Setiap Sekolah

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan “perbedaan” adalah sebagai berikut: perbedaan; perbedaan, hal-hal yang membedakan satu objek dengan objek lainnya, seperti perbedaan perlakuan, atau sesuatu yang membedakan satu objek dengan objek lainnya.

Sarana diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI). Penjelasan tentang infrastruktur, atau sesuatu yang berfungsi sebagai pendukung utama untuk bisnis, pengembangan, atau implementasi proyek. Menurut penelitian sebelumnya (Putra 2020), penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan merupakan rangkaian kegiatan dan seluruh komponen yang berkontribusi terhadap efektifitas dan kinerja sesuai dengan tujuan pendidikan yang dimaksud. Mesin, meja, buku, pulpen, komputer, infocus, dan barang lain yang digunakan dan dipindahkan dianggap sebagai fasilitas. (Putra, 2020) Secara etimologis, infrastruktur bahasa mengacu pada alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. misalnya: lokasi, lapangan olah raga, gedung sekolah, uang, dll. Sarana langsung untuk mencapai tujuan pendidikan misalnya; Perpustakaan, laboratorium, ruangan, dll. Sebaliknya, infrastruktur berfokus pada benda tidak bergerak tetapi secara tidak langsung memainkan peran penting, seperti ruang belajar, gedung, dan tanah (Arikunto dan Yuliana, 2008).

Perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang tertib dan berkesinambungan diperlukan untuk setiap satuan pendidikan. Tanah, ruang

kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi listrik dan jasa, lapangan olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat singgah kreatif, dan ruang-ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang tertib dan berkesinambungan diperlukan pada setiap satuan pendidikan. Kemudian lagi, terdapat perbedaan dalam dinas pendidikan dan yayasan di setiap sekolah di Indonesia, khususnya perbedaan dalam dinas di sekolah-sekolah di wilayah metropolitan dan jauh. Di daerah terpencil, tidak ada infrastruktur karena sulit dijangkau dengan mobil, tidak ada listrik, dan tidak ada jaringan komunikasi yang menghubungkannya dengan daerah lain, yang memperlambat informasi. Selain itu, istilah "diskriminasi" mengacu pada layanan yang mendiskriminasi individu tertentu karena karakteristik individu tersebut.

Karena kecenderungan manusia untuk mendiskriminasi orang lain, diskriminasi adalah kejadian umum dalam masyarakat manusia. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil atas dasar suku, jenis kelamin, ras, agama, keyakinan politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga menjadi dasar tindakan diskriminasi (Hakim, 2016).

d) Peran Pemerintahan Dalam Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tujuan umum pendidikan adalah untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Pendidikan terutama bertujuan untuk:

1. menambah keahlian, keterampilan, dedikasi, dan kualitas;
2. membangun mentalitas yang sama;
3. mengembangkan metode spesifikasi yang lebih baik;
4. membina masyarakat di daerah.

Dalam arti yang lebih luas, pendidikan mendukung pembangunan bangsa dengan menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan terampil yang mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakekatnya adalah proses pemberdayaan, yang mencakup pengungkapan potensi individu untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.⁷

e) Upaya Pemerintah Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia

Pada tingkat pendidikan yang layak, perluasan akses dan perluasan nilai pendidikan secara keseluruhan masih merupakan masalah yang signifikan. Dalam hal ini pelayanan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan dasar, belum sepenuhnya diberikan kepada anak yang memerlukan perhatian khusus (anak berkebutuhan khusus). Anak-anak yang mendapat tempat dengan pertemuan ini adalah individu-individu yang memiliki masalah fisik, dekat dengan

⁷ Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.

rumah, mental, sosial, serta memiliki kemungkinan pengetahuan dan bakat unik. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, adalah untuk mendorong pemerataan dan perluasan pendidikan. Suatu kebijakan publik harus dilakukan dengan perencanaan yang matang sebelum dapat diimplementasikan. Setidaknya ada dua pendekatan yang harus digunakan ketika membahas perencanaan pembangunan:

1. Pendekatan secara administrasi negara (public administration)
2. Pendekatan secara manajerial (management approach).

Bagaimanapun metodologi yang digunakan, baik secara otoritatif maupun dalam penyelenggaraan negara manapun, keduanya tentu terkait dengan tiga macam perspektif, yaitu:

1. aspek filsafat
2. aspek hukum
3. aspek politik
1. Berkaitan dengan

Berkenaan dengan masalah perluasan dan pemerataan pendidikan, Pemerintah Pusat dan Daerah telah melaksanakan perluasan dan pemerataan pendidikan sebagai kebijakan publik yang komprehensif untuk mewujudkan prinsip-prinsip UUD 1945.

khususnya, "... untuk mencerdaskan kehidupan bangsa."

Di Indonesia, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya nasional untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Di antaranya membebaskan biaya sekolah dasar (SD), membentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMA Negeri. Sekolah (SMU). mendapatkan bantuan untuk siswa yang tidak memiliki banyak. Namun, harus diakui bahwa upaya pemerintah tersebut belum berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka putus sekolah masyarakat, khususnya dari SMP ke SMA, dan tidak menutup kemungkinan juga ada angka putus sekolah dari SD ke SMP. Padahal pemerintah telah menetapkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang sebelumnya adalah Wajib Belajar Sembilan Tahun (Hakim, 2016).

f) Tujuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Terhadap Sekolah Terpencil

Dalam pendidikan, sarana dan prasarana merupakan tugas operasional yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain fasilitas belajar. Siswa, guru, atau tenaga pengajar, dan sekolah saling terkait ketika menyangkut pentingnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Siswa akan merasa lebih terbantu dalam pendidikannya jika sekolah memiliki sarana dan prasarana. Memang tidak semua mahasiswa memiliki pengetahuan, namun pemanfaatan fasilitas dan sistem tersebut secara baik akan lebih bermanfaat bagi mahasiswa yang memiliki kekurangan dan kekurangan dalam kegiatan pengalaman pendidikan. Guru akan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif, variatif, menyenangkan, menarik, dan bermanfaat dengan dukungan fasilitas pembelajaran. Hal ini akan sangat membantu proses pembelajaran. Sebaliknya sekolah harus

mampu menjaga, memelihara, dan memelihara apa yang telah disediakan oleh sarana dan prasarana tersebut (Putra, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu sumber yang paling utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Maka dari itu diharapkan sarana dan prasarana haruslah dapat memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Sarana pendidikan adalah seluruh bahan yang akan digunakan agar dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan, sedangkan prasarana pendidikan ialah seluruh jenis peralatan yang digunakan oleh tenaga pendidik agar dapat mempermudah terlaksananya proses pembelajaran. Dan yang menjadi salah satu faktor pendukung suatu keberhasilan program pendidikan ialah sarana dan prasarana pendidikan. Ketika sarana dan prasarana tidak memadai maka akan berakibat masalah minimnya pendidikan disebabkan keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran di dalam sekolah.

REFERENSI

- Barnawi, & Arifin, M. (2012). Manajemen sarana dan prasarana sekolah, (171011500095).
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53–64.
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. nomor 24 tahun 2007. (2007). Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.
- Putra, B. M. J. (2020). *Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan pengelolaannya*. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/dp34h>
- Sabrina, E., Michael, T., & Rozarie, P. R. A. De. (1945). *Educational Rights in Supporting Student Creativity*
- Trisnawati, Zahri Harun, C., & Usman, N. (2017). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sd Negeri Lamteubee Aceh Besar. *Jurnal Administrasi Pendidikan : Program Pascasarjana Unsyiah*, 7(1), 62–69.

